

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemanfaatan pengendalian internal terhadap keuangan daerah sangat lah penting dikarenakan pemerintahan menjadikan pondasi utama dalam berkembang dan majunya sebuah negara. Karena pengendalian intern sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional organisasi, sehingga dalam situasi instansi pemerintahan harus ada pengendalian internal yang jelas dan memadai agar dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam mewujudkan tujuan negara, penyelenggaraan pemerintahan tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga, pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan memerlukan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka SPI diselenggarakan di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dalam menyusun laporan keuangan terdapat proses dan tahapan yang diatur dalam SAP daerah. Dalam sistem tersebut diatur tentang SPI. Sehingga, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh SPI yang dimiliki pemda. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan (Kasim, 2015).

Dengan tercapainya tujuan organisasi akan berimbas pada pemerintahan yang kinerjanya baik dan dapat dipercaya, sehingga investor percaya untuk menginvestasikan uangnya pada negara tersebut dan secara otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Di Indonesia sendiri pengendalian intern merupakan salah satu masalah yang mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK selaku badan pengawas keuangan yang melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah. Opini WDP ini diperoleh LKPP untuk beberapa tahun terakhir ini. Sistem pengendalian intern mencakup struktur organisasi, semua metoda-metoda dan cara yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan serta mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Basri 2015).

System pengendalian internal menurut PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian lain dari pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi

akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery 2013:159).

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain system informasi berbasis teknologi computer atau website. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang dikembangkan suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative suatu kebijakan oprasional yang diambil. Kualitas program berhubungan dengan akuntabilitas public, karna pemerintah sebagai pengembang amanat masyarakat bertanggungjawab atas kualitas yang telah dilakukannya, hal tersebut karna pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya (Mecling 2008). Dalam hal indikator kualitas, sebagai dasar untuk mengukur kualitas, di pakai indikator input, autput, atcome, benefit dan impact. Dalam kenyataan, indicator yang dapat didefinisikan hanyalah input dan autput, sedangkan indicator lainnya lebih sulit diukur dan ditentukan keberhasilannya (Marjiono, 2009).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi ini merupakan sistem yang umumnya

berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan termasuk auditing, akuntansi keuangan dan pelaporannya, manajerial/manajemen akuntansi dan pajak. Pengertian sistem informasi akuntansi (SIA) adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Dengan begitu, manajemen perusahaan bisa melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga bisa mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi data perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi serta pengendalian internal dan ukuran keamanan (Romney dan Steinbart 2015:10). Untuk membangun suatu sistem informasi akuntansi yang baik atau berkualitas perusahaan harus mencermati kendala-kendala untuk perancangan SIA dengan cara mengidentifikasi konflik antara sasaran dengan kendalakendala tersebut, karena untuk mendapatkan suatu sistem yang berkualitas tergantung dari pengembangan atau perancangan yang dilakukan perusahaan tersebut dengan cara mengatasi dan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi, seringkali perusahaan menghadapi kendalakendala yang menghambat perancangan suatu sistem antara lain kendala dari pihak manajemen itu sendiri yang muncul jika sistem yang dirancang akan mempengaruhi keamanan atau kedudukannya dalam perusahaan sehingga mereka

menentang penerapan sistem tersebut (Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini 2011:247).

Adapun peran sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan. Sistem informasi akuntansi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan Anda karena sistem ini menyediakan berbagai elemen penting dalam siklus akuntansi. Sistem ini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan Anda. Data spesifik lain seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Contoh dari aplikasi sistem informasi akuntansi ini adalah Jurnal. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. upaya yang kongkrit dalam mewujudkan akunabilitas pengelolaan keuangan pemerintah ,maupun pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah dengan menyampaikan dan memberikannya laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Bandi, 2014).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip - prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPD/DPRD dan masyarakat umum setelah di audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Telah menjadi suatu konsekuensi apabila laporan keuangan tersebut harus di laporkan secara terbuka dan dapat dengan mudah di akses oleh para pengguna informasi di karenakan laporan keuangan merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan tugas yang di berikan oleh masyarakat dan mewujudkan *good governance* di pemerntahan daeah itu sendiri (Vincent 2009). laporan keuangan secara sederhana dimana pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan (Kasmir 2013:7).

Penyampaian laporan pertanggung jawaban itu merupakan salahsatu bentuk agent kepada principal. Ketika terjadi kepentingan yang berbeda antara principal dan agent maka akan menimbulkan masalah keagenan, sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang berbeda untuk mengitrepertasikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat

dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 17 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa gubernur/bupati/wali kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari vertical (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Komite standar akuntansi pemerintahan (2013) mengemukakan bahwa penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas dari laporan keuangan itu sendiri serta didukung oleh adanya transparansi dari laporan keuangan tersebut. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Hasbuan, dkk. 2013).

Terdapat fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai pengaruhnya pengendalian internal terhadap laporan keuangan yang di nilai masih kurang efektifnya pengendalian internal. Kecurangan di Indonesia sering kali terjadi pada perusahaan BUMN, terlebih dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Kecurangan terjadi pada PT Bank Mandiri Tbk (Persero) dimana terjadi dalam kasus penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya dilakukan oleh oknum pejabat internal PT Bank Mandiri Tbk (Persero). Kasus ini diduga dilakukan oleh salah satu *Commercial Banking Manager* PT Bank Mandiri Tbk (Persero), Surya Baruna yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,83 triliun, namun kecurangan tersebut tidak terdeteksi oleh auditor internal PT Bank Mandiri Tbk (Persero), dengan kejadian tersebut PT Bank Mandiri Tbk (Persero), pihaknya akan terus memantau aktivitas yang janggal pada PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (Rohan Hasan,2018) (www.ekonomikompas.com). “Tidak bisa dipungkiri, bahwa kecurangan masih bisa terjadi, walaupun didukung dengan adanya evaluasi terhadap efektifitas pengendalian serta keahlian dari auditor” (Rohan Hasan, Sekretaris PT Bank Mandiri Tbk 2018) (www.tribunnews.com).

Fenomena kedua disini mengenai Sistem Informasi Akuntansi adalah masih terdapat Sistem Informasi Akuntansi yang tidak berkualitas di beberapa perusahaan asuransi. Yang pertama adalah pada perusahaan asuransi Asabri pada tahun 2017. Sistem Informasi Akuntansi yang dimiliki oleh PT Asabri belum berkualitas, hal ini berdasarkan dengan temuan BPK yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2016. Pada pemeriksaan tersebut Ketua BPK Harry Azhar Azis

menyatakan bahwa kinerja pengelolaan investasi PT Asabri (Persero) sebesar 59,61 persen atau kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh dua poin yang mencerminkan ketidakefisienan Asabri dalam mengelola portofolio investasinya dan juga pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi yang belum berkualitas. Salah satu poinnya adalah direksi PT Asabri belum membuat aplikasi pelayanan terpadu untuk pembayaran pensiun dan Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada aplikasi santunan belum terintegrasi dengan baik karena aplikasi belum dapat memberikan informasi atas peserta pensiun yang sudah dibayarkan santunan. Direktur utama PT Asabri yaitu Sonny Widjaja menyatakan perusahaan asuransi dan pensiun para TNI/Polri tersebut belum 100% menyediakan Teknologi (IT) seperti computer dan juga komunikasi yang dikatakan belum sepenuhnya memadai karena masih terdapat kendala yaitu penyimpanan data yang berisikan program-program aplikasi belum sepenuhnya bekerja dengan baik yang menyebabkan akurasi dan kecepatan pelayanan kepada peserta menjadi belum meningkat, cepat dan lebih luas cakupannya, dan pada aplikasi santunan belum terintegrasi dengan baik sehingga berpotensi merugikan negara. Harry selaku ketua BPK merekomendasikan agar PT Asabri segera membuat aplikasi pelayanan terpadu untuk santunan terintegrasi dengan baik. Asabri juga harus menerapkan prinsip hati-hati dan berpegang pada asas good corporate governance, serta memperhatikan kepentingan perusahaan dalam penempatan investasi (Fajar Pebrianto. Temp.co. 2020. Diakses pada 16 Mei 2020).

Fenomena ketiga adalah Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triatlon Indonesia (PPFTI) Mark Sungkar didakwa rugikan keuangan negara Rp 694,9

juta. Dakwaan itu atas dasar kasus laporan keuangan fiktif yang tidak dapat di buktikan keaslian nya dalam kegiatan dana Pelatnas Asian Games 2018 di Bandung, Jawa Barat. "Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti/ dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel, Bandung, Jawa Barat," kata Jaksa Penuntut Umum Nopriyadi dilansir dari Tribunnews.com, Rabu (3/3/2021). Dalam dakwaannya, Mark Sungkar disebut tidak segera mengembalikan dana sisa kegiatan ke kas negara yang ditransfer oleh pihak The Cipaku Garden Hotel. Sehingga, perbuatan itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Jaksa juga menyebut bahwa Mark Sungkar menyampaikan laporan penggunaan yang diterima oleh PPFTI melebihi waktu 14 hari setelah kegiatan selesai.

Perbuatan itu disebut bertentangan dengan peraturan soal petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah. Adapun dalam peraturan tersebut, khususnya bagian Bab III dijelaskan bahwa penerima bantuan pemerintah wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Olahraga, paling lambat 14 hari setelah pelaksanaan kegiatan rampung. Diketahui pada 2017, Mark Sungkar mengajukan proposal kegiatan bertajuk 'Era Baru Triatlon Indonesia' ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) senilai Rp 5,072 miliar. Namun sisa uang Rp 399,7 juta dari kegiatan malah digunakan memperkaya diri sendiri. Bahkan Mark Sungkar

juga disebut memperkaya orang lain, antara lain Andi Ameera Sayaka sebesar Rp 20,65 juta. Kemudian Wahyu Hidayat Rp 41,3 juta, Eva Desiana sebesar Rp 41,3 juta, Jauhari Johan Rp 41,3 juta, atau pihak korporasi The Cipaku Garden Hotel atas nama Luciana Wibowo Rp 150,65 juta. Jika ditotal, kerugian keuangan negara atas tindakan itu sebesar Rp 694,9 juta sebagaimana laporan hasil audit BPKP, Jaksa Penuntut Umum Nopriyadi dilansir dari Tribunnews.com, Rabu (3/3/2021).

Fenomena khusus yang terjadi pada kantor BKAD Kabupaten Bandung masih terdapat kendala , yang dimana masalah keamanan sistem dan juga pengoprasian aplikasi yang kurang memadai dimana sistem yang telah di tutup oleh operator data yang telah di input masih dapat di rubah,dan juga tidak semua sdm pada satuan kerja BKAD tidak semuanya dari bagian akuntansi yang konotasi nya tidak semua mengerti terhadap bagian keuangan,dengan kendala yang terjadi berpengaruh dengan adanya salah catat terhadap laporan keuangan yang sehingga harus di lakukan evaluasi terhadap kinerja team dan juga kinerja sistem informasi akuntansi dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam kualitas pendukung computer maupun jaringan pada kantor BKAD Kabupaten Bandung .menurut Tedy Anwar (2021) selaku sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai pengendalian internal dan juga sistem informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang masih di nilai sangat lemah dalam penerapannya, namun tidak sepenuhnya terdapat kelemahan seperti pengendalian internal yang berpengaruh terhadap kualitas keuangan yang ada pada satu perusahaan maupun pemerintahan

dengan kualitas pengendalian internal yang sudah dapat di laksanakan secara baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kompyurini dan dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan (Prasetyono 2007). Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak pada pemerintahan teknologi informasi, karna pada umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan dalam membantuk kegiatan di sector public dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sementara dalam penelitian menyebutkan bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan, serta pengendalian internal akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan (Dedi Rianto2013). Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan system pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Nyoman 2013).

Penelitian ini berfokus kepada seberapa pentingnya pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan sehingga di latar belakang oleh peneliti terdahulu yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negative (Indriasari danNahartyo 2008). Kemudian di dukung dengan penelitian yang mengatakan bahwa variable independen yang digunakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,

pengendalian internal akuntansi, dan komitmen organisasi. Variable dependen yang digunakan adalah keandalan dan timeliness pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan dan Timeliness pelaporan keuangan (Arfianti 2011).

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mengenai Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan ang di tuangkan dalam usulan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survei Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ,maka identifikasi permasalahan yang dapat disimpulkan dan yang di bahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kantor BKAD Kabupaten Bandung telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik namun kelalaian maupun kesalahan masih di lakukan oleh pihak internal kantor..
2. Kantor BKAD Kabupaten Bandung telah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik ,namun salah dalam penggunaan sistem tersebut masih terjadi.

3. Masih lemahnya mengenai kualitas laporan keuangan yang akurat untuk digunakan sebagai informasi.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah guna memperoleh bukti empiris mengenai data yang terkait dengan pengaruh Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang akan di analisis lebih lanjut kembali.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur tentang seberapa berpengaruhnya Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan menambah wawasan , pengetahuan dan keilmuan penulis mengenai seberapa besar pengaruh pengendalian internal dan system informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan gambaran serta memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan kualitas laporan keuangan yang baik dalam setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Selain memiliki kegunaan praktis, di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri sesuai dengan topik yang terkait tentang pengaruh dukungan manajemen puncak dan partisipasi pengguna terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

